

## UJIAN NASIONAL SEBAGAI CERMIN MUTU PENDIDIKAN DAN PEMERSATU BANGSA

### NATIONAL EXAM AS A REFLECTION FOR QUALITY OF EDUCATION AND A NATION ADHESIVE

Safari

Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud  
Jalan Gunung Sahari Raya No. 4A Jakarta Pusat  
e-mail: safari\_puspendik@yahoo.com

Naskah diterima tanggal: 17/06/2015, Direvisi akhir tanggal: 03/08/2015, disetujui tanggal: 10/08/2015

**Abstract:** *The aim of this study was to answer the question whether the national examination can be a nation adhesive and UN results can reflect the quality of education. This research used survey method. The study population was the educator in Banda Aceh province of Aceh in 2014, while the sample as much as 78 respondents consisting of 24 SMAN (public senior secondary school) students and 27 MAN (public islamic senior secondary school) students, 19 teachers SMAN and MAN, 8 officials in ministry of educational culture including the principal of SMAN and MAN. Based on the results of the descriptive analysis of the results this research revealed reflected, first, respondents who had agreed UN as a nation adhesive is 79.5%, while respondents who had disagree is 20.5%. Second, respondents stated that the UN can reflect the quality of education is 59%, while respondents who said no is 41%. Based on the results of the study, it is concluded that the National Examination has become a nation adhesive and reflected the actual quality of education, although not maximized.*

**Keywords:** *national exam, education quality, students, teachers*

**Abstrak:** *Tujuan studi ini adalah menjawab pertanyaan apakah ujian nasional dapat menjadi pemersatu bangsa dan apakah hasil UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional. Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi penelitian ini adalah pelaku pendidikan di Banda Aceh Provinsi Aceh tahun 2014, dengan sampel sebanyak 78 responden yang terdiri dari 24 siswa SMAN dan 27 siswa MAN, 19 guru SMAN dan MAN, 8 pejabat di lingkungan Dikbud termasuk kepala sekolah SMAN dan MAN. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil, pertama, responden yang menyatakan setuju UN sebagai pemersatu bangsa adalah 79,5%, sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju adalah 20,5%. Kedua, responden yang menyatakan bahwa hasil UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional adalah 59%, sedangkan responden yang menyatakan tidak adalah 41%. Berdasarkan hasil studi disimpulkan bahwa Ujian Nasional sudah menjadi perekat bangsa dan mencerminkan mutu pendidikan walaupun belum maksimal.*

**Kata kunci:** *ujian nasional, kualitas pendidikan, mutu siswa, guru*

#### Pendahuluan

Persatuan merupakan tujuan yang paling utama di negara Republik Indonesia yang penduduknya sangat beragam suku, agama, etnis, dan bahasa ibunya. Pentingnya persatuan sebagai landasan berbangsa dan bernegara Indonesia tidak hanya

bertumpu pada kesatuan teritorial, akan tetapi juga eksistensi kebudayaan nasional termasuk pendidikan yang di dalamnya terdapat ujian nasional (UN). Alat pemersatu atau pemersatu bangsa yang sudah ada adalah bahasa nasional, dasar negara, lagu kebangsaan, lambang

negara, semboyan negara, bendera negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan kebudayaan nasional.

Terlepas pro dan kontra pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Indonesia, UN telah berjasa sampai sekarang yaitu menjadi pemersatu bangsa karena telah dilakukan bertahun-tahun yang melibatkan peserta didik di seluruh Indonesia yang berbeda suku, ras, agama, dan budaya dengan tujuan yang sama. UN telah berjasa, di samping ijazahnya berlaku secara nasional, UN dapat menentukan tingkat kemampuan peserta didik di seluruh Indonesia berdasarkan standar nasional yang telah ditetapkan. Nilai perolehan siswa dapat dibandingkan dengan siswa lain antarsekolah, antar-kabupaten, dan antarprovinsi di seluruh Indonesia karena menggunakan kisi-kisi UN yang berstandar nasional. Di samping itu soal-soal UN bersifat: 1) transparan artinya jelas apa yang diujikan dan kriteria penskorannya; 2) autentik artinya merupakan hasil kerja siswa dan sesuai dengan dunia riil/nyata; dan 3) *fair* kepada semua pihak artinya tidak merugikan pihak tertentu; tidak memihak suku, agama, etnis, dan bahasa ibu tertentu atau sekolah yang berada di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi tertentu karena soal-soal dalam UN telah disusun secara profesional (sebagai pemersatu bangsa). Prosesnya melibatkan banyak pihak di antaranya guru bidang studi, ahli materi dari perguruan tinggi, pengembang kurikulum, ahli konstruksi tes, ahli kebijakan dan lain sebagainya. Proses penulisan soalnya berdasarkan kisi-kisi standar nasional, sebelum digunakan dilakukan analisis kualitatif, uji coba butir soal, dan analisis kuantitatif terlebih dahulu. Proses ini belum ditemui pada soal buatan guru di sekolah atau dosen di perguruan tinggi. Proses seperti ini belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum khususnya kepada pihak yang kontra atau tidak suka atau tidak paham dengan UN, sehingga masih ada pihak yang meragukan apakah hasil UN dapat mencerminkan mutu pendidikan di Indonesia dan dapat menjadi alat pemersatu

bangsa. Dua aspek ini sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Apabila dua hal ini tidak segera dicarikan solusinya, pelaksanaan UN selalu mengalami pro dan kontra di tanah air. Inilah yang menjadi dasar utama studi ini dilakukan.

Permasalahan yang dihadapi bangsa ini adalah bahwa mutu sekolah di tanah air sampai saat ini belum relatif sama, baik proses belajar-mengajarnya, kemampuan gurunya, maupun sarana prasarannya. Bila UN diserahkan ke sekolah sekarang, sudah siapkah setiap sekolah melaksanakannya? Samakah makna nilai 8 di sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya, baik di tingkat rayon/kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional (karena kemampuan menyusun soal dan soal atau tesnya sendiri berbeda-beda di setiap sekolah)? Apakah ijazah siswa berlaku secara nasional? Pada prinsipnya, penilaian dapat dilaksanakan secara intern dan ekstern. Penilaian intern adalah penilaian yang dilakukan oleh guru sendiri karena yang tahu persis kemampuan siswa adalah guru yang mengajarkan. Alasan lain dilakukan penilaian secara intern karena ada kebijakan khusus (termasuk rahasia) yang tahu adalah guru bukan pihak lain. Adapun penilaian ekstern adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak lain (Pemerintah). Alasannya adalah supaya hasilnya objektif, dapat dibandingkan antarsiswa, sekolah, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Sebagai pemersatu bangsa, UN sangat berjasa sebagai barometer minimal bagi sekolah di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan hal ini muncul pertanyaan berikut. Adilkah setiap siswa/sekolah harus menempuh soal yang sama dalam UN, sedangkan sarana prasarana di setiap sekolah tidak sama, kemampuan gurunya juga tidak sama? Soal-soal yang diujikan dalam UN merupakan kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa pada tingkat satuan pendidikan yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL) sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Justru UN sebagai barometer minimal bagi sekolah. Apabila tidak ada barometer ini, mutu sekolah di tanah air dikontrol menggu-

nakan alat apa? Sudah ada alat lainkah yang lebih akurat saat ini? Apa lagi adanya perbedaan pemahaman istilah "otonomi" di sekolah, mutu sekolah semakin "tidak jelas", bahkan lulusan SD/MI atau SMP/MTs masih ada siswa yang belum bisa membaca, menulis, dan menghitung. Pada saatnya nanti memang perlu ada soal yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswanya. Soal-soal yang bersangkutan harus terkalibrasi artinya dapat dipergunakan untuk membandingkan tingkat kemampuan siswa baik di tingkat sekolah, kabupaten, nasional.

UN, termasuk Ujian Sekolah, merupakan satu kesatuan proses belajar mengajar di sekolah. UN bukan suatu kegiatan terpisah di dalam pembelajaran. Oleh karena itu banyak masyarakat yang bertanya. Adilkah, guru mengajar 6 tahun di SD/MI, 3 tahun di SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sedangkan menempuh ujian dalam UN hanya 120 menit? Materi yang diujikan hanya mengukur aspek kognitif, tes tertulis, dan bentuk soalnya hanya pilihan ganda? Dengan adanya kondisi seperti ini, guru di sekolah dalam menyusun soal untuk keperluan ujian sekolah (US) seharusnya tidak hanya menanyakan aspek kognitif lagi karena sudah diujikan dalam UN. Seharusnya pada US menanyakan aspek psikomotorik dan afektifnya. UN mempergunakan bentuk soal pilihan ganda dengan tujuan penskorannya objektif, akurat, dan hasilnya cepat dapat diumumkan secara nasional karena mempergunakan scanner dan komputer. Adapun proses belajar-mengajar di kelas di dalamnya termasuk penilaian proses (formatif) dan penilaian hasil (sumatif), dengan demikian antara penilaian proses dan hasil tidak bisa dipisah-pisahkan. Siswa dapat menempuh UN syaratnya adalah siswa yang bersangkutan harus naik kelas dahulu dari kelas 1 naik ke kelas 2, dari kelas 2 naik ke kelas 3, dari semester 1 ke semester 2 dan seterusnya. Tidak bisa siswa yang tidak naik di kelas tertentu langsung bisa ikut UN. Artinya siswa yang mengikuti UN sudah melalui penilaian proses di kelasnya.

Mengapa pada UN ditetapkan standar kelulusan (misal 3,0 – 4,26 – 5,0 – 5,26 – 5,50)? Standar menjadi fokus perhatian utama dalam penilaian. Karena standar sangat diperlukan sebagai acuan minimal (kompetensi) yang harus dipenuhi oleh siswa dalam pembelajaran atau seorang lulusan dari tingkat satuan pendidikan. Selama ini guru memberi nilai siswa di rapor minimal 60 (karena kriteria ketuntasan minimal (KKM) 60, sedangkan UN memberi standar 5,50 (atau dikonversi ke seratus=55,0). Nilai 55,0 dan 60 jaraknya masih jauh yang selisihnya 5,0. Jadi apabila siswa menjawab soal UN masih merasa sulit, ini menunjukkan bahwa materi tersebut belum dikuasai siswa secara tuntas, (Safari, 2008). Pertanyaannya adalah nilai 60 yang diberikan siswa selama ini 60 yang mana? Tugas guru yang utama di kelas adalah memaksimalkan kemampuan siswa menuju tuntas, bukan supaya siswa lulus UN. Jika kemampuan siswa memahami materi tuntas, dengan sendirinya pasti siswa lulus UN. Oleh karena itu, niat guru mengajar di kelas supaya segera diperbaharui yaitu "mengajar secara tuntas".

Berdasarkan Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, UN dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, tujuan utama diadakan UN adalah sebagai implementasi dan upaya pencapaian standar nasional dan standar kompetensi lulusan agar memperoleh gambaran tentang efektivitas sistem pendidikan. Standar nasional sangat diperlukan di negara RI, karena tanpa UN tidak mungkin dapat ditentukan standar nasional lulusan (Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, 2007). Di samping itu, keberadaan standar nasional kelulusan akan dapat memperkecil variabilitas antarsekolah di nusantara, karena setiap sekolah akan berupaya untuk meraih hasil minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP). Apabila kualitas pendidikan di negara kita sudah cukup layak, maka UN dapat dihapuskan atau tetap dijalankan dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Sudah saatnya kemerdekaan yang sudah cukup lama ini diisi dengan nilai-nilai membangun kebangsaan seperti belajar keras. Hendaknya para penerus generasi bangsa khususnya para pemuda dari kalangan pelajar mempunyai jiwa nasionalisme yang kuat yaitu dapat belajar secara intensif dan sungguh-sungguh yang disertai dengan karakter atau prinsip "takut kepada Tuhan dan malu berbuat tercela". Oleh karena itu, UN sebagai pemersatu bangsa diharapkan dapat menambah kokoh jiwa nasionalisme penerusnya. Diharapkan dengan adanya UN ini para peserta didik mendapat pembinaan prinsip tersebut sejak dini melalui pembelajaran di kelas, sehingga jiwa nasionalismenya tumbuh dengan baik. Jika para siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, serta seluruh komponen pendidikan sudah melaksanakan esensi dari prinsip di atas, maka setiap ada ujian nasional tidak akan dinodai oleh kecurangan-kecurangan dan pelanggaran nilai dan norma.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, apakah terdapat persepsi bahwa Ujian Nasional (UN) dapat menjadi alat pemersatu bangsa? Kedua, apakah terdapat persepsi bahwa hasil UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional? Oleh karena itu, permasalahan ini merupakan tujuan utama dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menentukan apakah UN dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Kedua, apakah hasil UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional.

Hasil yang diharapkan studi ini adalah diperolehnya informasi hasil studi tentang persepsi bahwa UN dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan persepsi bahwa hasil UN

dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional.

## **KAJIAN LITERATUR**

Ujian Nasional (UN) merupakan cermin mutu pendidikan. Berdasarkan laporan hasil UN 2014 (Puspendik, 2014) menunjukkan bahwa kelulusan siswa SMP/MTs mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012/2013. Pada tahun 2013 tingkat kelulusan siswa SMP/MTs sebesar 95,56%, sedangkan pada tahun 2014 tingkat kelulusannya mencapai 99,94%. Naik-turunnya mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor guru, siswa dan masyarakat. Hasil penelitian Lembah, Tellu, Juraid, Mahpudz, dan Haeruddin (2010) menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi pencapaian kompetensi siswa dalam UN adalah kemampuan guru mengembangkan perangkat pembelajaran pada aspek kuantitatif dalam kategori sangat baik, namun untuk aspek yang bersifat kualitatif berada dalam kategori cukup. Hasil penelitian Afiati (2006) menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat penting karena keterlibatan masyarakat dalam ikut serta meningkatkan mutu pendidikan sangat berpengaruh pada hasil capaian prestasi siswa. Jadi UN sebagai cermin mutu pendidikan tergantung pada tingkat kemampuan siswa dalam menjawab tes yang diberikan. Semakin tinggi kemampuan siswa dalam memahami materi yang diujikan, semakin tinggi peluang menjawab benar soal yang diujikan. Jadi tes merupakan dasar utama yang dipergunakan untuk menentukan tingkat kemampuan siswa, karena tes merupakan instrument atau langkah-langkah yang sistematis untuk mengukur contoh perilaku (Linn dan Gronlund, 2008). Tes juga merupakan metode penyelidikan yang sangat berguna dalam lapangan ilmu jiwa, banyak hal yang tidak dapat dicapai dengan metode lain tapi dapat diungkapkan dengan metode tes (Ahmadi, 2009). Menurut Brown dalam Azwar (2007) bahwa tes merupakan prosedur yang sistematis

guna mengukur sampel perilaku seseorang. Jadi tes adalah sederetan pertanyaan/latihan/alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Hasan, 2009). Berdasarkan dari cara mengajukan pertanyaan menurut Djaali dan Muljono (2007) tes terbagi menjadi tes: tertulis, tidak tertulis (lisan), dan perbuatan. Tes yang baik adalah memiliki validitas yang tinggi baik validitas isi, konstruk, maupun kriterianya (Djiwandono, 2008). Di samping valid, alat ukur harus reliabel. Reliabilitas instrumen merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data pengukuran kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu berlainan atau kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan (Suryabrata, 2008).

Di samping merupakan cermin mutu pendidikan, UN juga sebagai pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa maksudnya adalah alat untuk mempersatukan orang-orang yang bersatu karena kesamaan keturunan. Alat pemersatu bangsa yang sudah ada adalah: lambang negara, semboyan negara, bahasa Indonesia, bendera negara, lagu kebangsaan, konstitusi negara (hukum dasar). Adapun alat pemersatu bangsa yang berkaitan dengan Ujian Nasional (UN) di antaranya adalah: kisi-kisi tesnya sama, kurikulum sebagai sumber acuannya sama.

Ujian Nasional sebagai alat pemersatu bangsa memerlukan karakter atau prinsip "takut kepada Tuhan dan malu berbuat tercela". Prinsip ini sudah saatnya sebagai dasar menumbuhkan/membangkitkan nasionalisme bangsa. Karakter ini sudah harus ditanamkan kepada para siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, serta seluruh komponen pendidikan agar pelaksanaan pendidikan khususnya pelaksanaan ujian nasional tidak akan dinodai oleh kecurangan-kecurangan dan pelanggaran nilai dan norma, karena UN menjadi pemersatu bangsa. Hasil penelitian yang berkaitan dengan pemersatu bangsa secara umum telah banyak dilakukan, namun

penelitian yang berkaitan khusus dengan UN sebagai pemersatu bangsa belum banyak dilakukan. Hasil penelitian Kusumah (2007) menunjukkan bahwa nasionalisme merupakan produk dari sejarah bangsa sendiri dan kenyataannya membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya untuk mendukung persatuan. Hasil penelitian Aisyah (2010) membuktikan bahwa batik merupakan budaya Indonesia dan pemersatu bangsa. Pada batik melambangkan kewibawaan, keperkasaan, dan kegagahan bagi yang memakainya, serta dapat digunakan untuk acara pernikahan karena bermakna bersatu kembali. Hasil penelitian yang dilakukan Pandansari (2014) menunjukkan bahwa Presiden Soekarno sebagai seorang negarawan melihat hubungan laki dan perempuan sebagai tiang pembangun masyarakat yang harus diperkuat dengan tujuan bersama yang kemudian dituangkan dalam Sarinah. Sarinah sebagai suatu filosofi perikehidupan berbangsa berbasis gender dapat menjadi bahan pembudayaan nilai persatuan Indonesia yang tertanam pada Sila ketiga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudjarwo (2012) menunjukkan bahwa nilai-nilai integrasi masyarakat di masing-masing daerah berbeda-beda. Ketidakmampuan mengenali hal ini akan membuat terjebak pada penafsiran dari dinamika sosial kepada gejala sosial. Oleh karena itu, untuk mendukung terwujudnya karakter pemersatu bangsa khususnya dalam UN atau pembelajaran di sekolah, para guru harus mendisain pembelajaran dan mengaplikasikan secara strategis kepada semua peserta didik agar meningkatkan kualitas: belajar, bimbingan, dan pendidikan dalam keluarga.

Komponen pertama adalah kualitas belajar. Prinsip "takut kepada Tuhan dan malu berbuat tercela" bisa terwujud bila didukung belajar yang berkualitas. Karena belajar yang berkualitas merupakan suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Perubahan

itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas (Derajat, 2005). Menurut James O Whittaker, belajar sebagai proses yaitu tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman (dalam Djamarah, 2008). Belajar pada hakikatnya "perubahan" yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu (Fathurrohman dan Sutikno, 2009).

Bimbingan sangat diperlukan dalam pembelajaran, karena bimbingan biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang sifatnya preventif, yaitu untuk menghindari terjadinya masalah atau problem. Misalkan bimbingan tentang akibat-akibat buruk dari rokok, akibat-akibat buruk dari narkoba. Semuanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Dalam hal ini di sini bimbingan dilakukan sebelumnya dalam rangka untuk mencegah terjadinya masalah (Dubois dan Mi Ley, 2005). Bimbingan adalah suatu proses yang berkesinambungan, bukan kegiatan seketika atau kebetulan, bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana dan terarah pada pencapaian kegiatan (Yusuf dan Nurihsan, 2008).

Pendidikan dalam keluarga juga sangat menentukan karakter siswa karena keluarga merupakan pusat pendidik yang pertama dan utama yang dialami siswa dan kehidupan keluarga selalu memengaruhi perkembangan budi pekerti siswa (Rohman, 2009). Keluarga juga merupakan lembaga pendidikan, orang tua sebagai pendidik dan anak-anak sebagai peserta didik (Sadulloh, 2007). Keluarga merupakan hubungan antarmanusia dalam keluarga (ayah, ibu, anak) sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial seorang anak (Somantri, 2007).

Hasil penelitian Jaidun (2011) menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi siswa pada mata pelajaran Matematika dan Sains baik dengan instrumen UN maupun *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* terbukti belum memuaskan, masih berada di antara skor 50-55 untuk skala 0-100.

## **METODE**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode survei. Dasar penggunaan metode survei adalah disesuaikan dengan tujuan utama penelitian ini di antaranya adalah untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual berdasarkan data penelitian ini. Tempat penelitian ini yaitu di Banda Aceh, Provinsi Aceh tahun 2014. Populasi penelitian ini yaitu pelaku pendidikan di Banda Aceh Provinsi Aceh tahun 2014, sedangkan sampelnya adalah 78 responden yang terdiri atas 24 siswa SMAN dan 27 siswa MAN, 19 guru SMAN dan MAN, 8 pejabat di lingkungan Dikbud termasuk kepala sekolah SMAN dan MAN. Alasan pemilihan populasi ini di antaranya bahwa provinsi ini pernah memiliki pengalaman perjuangan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sampel siswa adalah mereka yang sedang mengikuti Ujian Nasional (UN) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA pada tahun 2014. Data dalam penelitian ini berbentuk respon dari jawaban kuesioner. Adapun teknik sampling yang dipergunakan adalah purposive sampling. Alasannya adalah peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dipergunakan untuk menghitung persentase persepsi pelaku pendidikan tentang UN sebagai mutu pendidikan dan pemersatu bangsa. Agar hasil analisis penelitian ini dapat diperoleh secara akurat, maka semua data dalam penelitian ini diolah atau dianalisis dengan mempergunakan program SPSS 20.00.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Ujian Nasional sebagai Pemersatu Bangsa**  
Berdasarkan hasil analisis Tabel 1 menunjukkan bahwa responden (78 responden yang terdiri dari 24 siswa SMAN dan 27 siswa MAN, 19 guru

SMAN dan MAN, 8 pejabat di lingkungan Dikbud termasuk kepala sekolah SMAN dan MAN) yang menyatakan setuju UN sebagai pemersatu bangsa (79,5%) sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju (20,5%). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Alasan responden yang menyatakan setuju di antaranya: 1) bisa menyatukan pemahaman siswa terhadap pembelajaran secara nasional; 2) membuat siswa setara di seluruh Indonesia dalam belajar; 3) dapat menjadi standar nasional dan kesetaraan nasional; 4) UN menentukan mutu pendidikan di Indonesia dengan siswa berprestasi untuk masa depan bangsa; 5) UN merupakan standar bagi seluruh siswa untuk menentukan layakkah mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan UN juga menjadi pemicu siswa untuk dapat bersaing dalam belajar; 6) UN sebagai pemersatu bangsa dapat menghubungkan atau menjadi sebuah alat untuk meningkatkan mutu pendidikan; 7) UN sebagai tolok ukur nilai standar siswa; 8) untuk memotivasi anak bangsa agar lebih giat untuk berusaha menjadi orang yang sukses; 9) soal UN jangan dijadikan wadah politik; 10) bisa menyatukan pemahaman siswa senasib sepenanggungan, kebersamaan, dan semangat kerja keras generasi penerus bangsa; 11) Indonesia negara kesatuan, harus punya standarisasi dalam pendidikan dan UN sebagai

pemersatu bangsa; 12) penyetaraan kualitas pendidikan dan menciptakan rasa senasib seperjuangan di kalangan siswa dan penyelenggara. Adapun alasan responden yang menyatakan tidak setuju yaitu: 1) UN dapat membuat siswa stress, hanya karena 3 atau 4 hari ujian menentukan kelulusan siswa yang telah belajar 3 tahun; dan 2) belum tentu daerah terpencil mendapatkan pendidikan yang setara.

### Hasil Ujian Nasional dapat Mencerminkan Mutu Pendidikan secara Nasional

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan bahwa UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional adalah 46 (59%), sedangkan responden yang menyatakan tidak adalah 32 (41%).

Alasan responden yang menyatakan UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional yaitu: 1) jika dilakukan dengan jujur dapat mengukur mutu pendidikan secara nasional; 2) mencerminkan tingkat keberhasilan proses belajar dari seluruh tanah air; 3) soalnya sama dan standarnya sama; 4) mencerminkan tingkat keberhasilan proses belajar dari seluruh tanah air; 5) karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbasis kepulauan, jadi soal-soalnya harus berstandar nasional juga; 6) UN bisa dijadikan sebagai tolok ukur sebuah sekolah

Tabel 1 Frekuensi Setuju dan Tidak Setuju tentang UN sebagai pemersatu bangsa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1. Setuju	62	79.5	79.5	79.5
2. Tidak Setuju	16	20.5	20.5	100.0
Total	78	100.0	100.0	

Tabel 2 Frekuensi Ya (1) Tidak (2) tentang Hasil UN dapat Mencerminkan Mutu Pendidikan secara Nasional

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1. Ya	46	59,0	59,0	59,0
2. Tidak	32	41,0	41,0	100,0
Total	78	100,0	100,0	

dalam membina murid selama ini; dan 7) UN dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia, maka UN menentukan mutu pendidikan nasional.

Adapun alasan responden yang tidak setuju di antaranya: 1) masih banyak kecurangan dalam pelaksanaannya; 2) nilai yang diperoleh di UN beda dengan kemampuan siswa sehari-hari; 3) pendidikan daerah tidak sama dengan di kota; 4) karena tidak semua sekolah memiliki metode pembejaran yang baik.

**Hasil Ujian Sekolah dapat Mencerminkan Mutu Pendidikan secara Nasional**

Tabel 3 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan bahwa Ujian Sekolah dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional adalah 49 (62,8%), sedangkan responden yang menyatakan tidak adalah 29 (37,2%).

Alasan responden yang menyatakan setuju di antaranya adalah apabila ujian sekolah didasarkan pada kurikulum nasional dan standar kompetensi lulusan (SKL) secara nasional.

Adapun responden yang menyatakan tidak setuju beralasan di antaranya adalah: 1) karena tidak terkontrol oleh pusat bisa terjadi kebocoran pada saat ujian; 2) karena Indonesia suatu kepulauan yang besar dan kondisi daerah di bidang pendidikan sarana, tenaga kependidikan tidak merata; dan 3) kemampuan dan capaian hasil belajar yang berbeda-beda.

**Nilai Minimum Lulus UN**

Tabel 4 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan bahwa nilai minimum lulus UN adalah 6,0 responden terbanyak menyarankan hal ini 33 (42,4%), sedangkan responden yang lainnya ada yang menyarankan minimal 5,50 ada 14 (17,9%), minimal 5,00 adalah 11 (14,1%), ada yang menyarankan minimal 2,00 ada 3(3,8%) bahkan ada yang menyarankan 7,50 ada 2(2,6%). Kesimpulannya adalah bahwa responden tidak setuju bahwa nilai minimal UN di antaranya disarankan 6,00.

Tabel 3 Frekuensi Ya (1) Tidak (2) tentang Hasil Ujian Sekolah dapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1. Ya	49	62,8	62,8	62,8
2. Tidak	29	37,2	37,2	100,0
Total	78	100,0	100,0	

Tabel 4 Frekuensi usulan nilai minimum lulus UN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	3,8	3,8	3,8
3,00	3	3,8	3,8	7,7
4,00	7	9,0	9,0	16,7
4,50	1	1,3	1,3	17,9
5,00	11	14,1	14,1	32,1
5,50	14	17,9	17,9	50,0
6,00	33	42,3	42,3	92,3
6,80	1	1,3	1,3	93,6
7,00	3	3,8	3,8	97,4
7,50	2	2,6	2,6	100,0
Total	78	100,0	100,0	



### Masih Perlu UN dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013

Tabel 5 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan bahwa UN masih diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adalah 39 (50%), sedangkan responden yang menyatakan tidak adalah 27 (34,6%), serta responden yang menyatakan diganti dengan model lainnya adalah 12 (15,4%). Kesimpulannya adalah bahwa responden tidak sama persepsinya terhadap pernyataan Ujian Nasional masih diperlukan dalam kurikulum 2013.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional walaupun belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pendidikan belum 100% mempercayai bahwa UN dapat mencerminkan mutu pendidikan di tanah air. Penyebabnya di antaranya adalah belum meratanya tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang di-UN-kan baik di tingkat sekolah, kabupaten, maupun provinsi. Ini merupakan cerminan tingkat keberhasilan proses belajar dari seluruh tanah air yang perlu didalami lebih lanjut, karena bangsa ini merupakan bangsa yang berbasis kepulauan, materi yang diujikan harus menyesuaikan yang berstandar nasional. UN sudah saatnya harus dapat dijadikan sebagai tolok ukur sebuah sekolah dalam membina siswa-siswanya. Naik-turunnya mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor guru, siswa, dan masyarakat. Untuk mendukung hal di atas, sudah saatnya guru dapat meningkatkan pengembangan perangkat pembelajaran

pada aspek kuantitatif dan kualitatif (Lembah dkk, 2010). Karena pencapaian kompetensi siswa pada mata pelajaran Matematika dan Sains baik dengan instrumen UN maupun *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* terbukti belum memuaskan, masih berada di antara skor 50-55 untuk skala 0-100, (Jaidun, 2011). Peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat penting karena keterlibatan masyarakat dalam ikut serta meningkatkan mutu pendidikan sangat berpengaruh pada hasil capaian prestasi siswa, (Afiati, 2006). Semuanya tergantung pada minat siswa itu sendiri karena terdapat hubungan yang signifikan antara minat siswa terhadap pembelajaran dengan hasil belajar siswa yaitu  $r=0,850$  (Mulyana, Hidayat, dan Sholih, 2013). Menurut Fahmi (2013) ada hal yang sangat penting yaitu penguasaan guru terhadap materi pelajaran karena kompetensi penguasaan materi pelajaran pada program IPA nilai terendah Biologi (20,77) dan tertinggi Bahasa Indonesia (92,00), pada program IPS nilai terendah Matematika (33,33) dan tertinggi Bahasa Indonesia (82,00). Di samping itu, menurut Suprastowo (2013) dampak ketidakhadiran guru dapat mengganggu proses pembelajaran, perilaku siswa menyimpang, penurunan prestasi siswa, dan citra sekolah.

UN sebagai pemersatu bangsa disetujui oleh sebagian besar responden, baik siswa, guru, maupun pejabat. Hal ini membuktikan bahwa UN dilaksanakan di semua sekolah di seluruh Indonesia dan semua siswa yang menjadi peserta UN mempunyai hak yang sama terhadap UN. Artinya UN tidak membedakan entis, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dengan

Tabel 5 Frekuensi Perlu (1) Tidak Perlu (2) Diganti (3) tentang UN dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	39	50,0	50,0	50,0
2	27	34,6	34,6	84,6
3	12	15,4	15,4	100,0
Total	78	100,0	100,0	

adanya UN ini, diharapkan jiwa dan semangat kebangsaan peserta didik akan terbentuk melalui pembelajaran di sekolah. Apabila muncul adanya ego-sektoral, ego-primordial, dan ego-religional akan bisa segera dihindari, bahkan dikikis sejak dini. Sebagai contoh dalam mata pelajaran PKn pembelajarannya dimasukkan ideologi Pancasila yang mampu merekatkan bangsa. Pendidikan Agama diperlukan untuk membangun moral supaya generasi muda tidak radikal dan tidak fundamentalis. Bahasa Indonesia merupakan aset nasional yang terbukti telah mempersatukan bangsa. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Pandansari (2014) menunjukkan bahwa suatu filosofi perikehidupan berbangsa berbasis gender dapat menjadi bahan pembudayaan nilai persatuan Indonesia yang tertanam pada Sila ketiga. Di samping itu, dikuatkan dengan hasil penelitian Kusumah (2007) yang menunjukkan bahwa nasionalisme merupakan produk dari sejarah bangsa sendiri dan kenyataannya membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya untuk mendukung persatuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudjarwo (2012) juga sangat mendukung bahwa nilai-nilai integrasi masyarakat di masing-masing daerah berbeda-beda. Hasil penelitian Sutjipto (2013) juga sangat mendukung bahwa norma dan nilai-nilai tidak saja berfungsi sebagai sarana perekat satu sama lain antarkomunitas, tetapi juga bermanfaat untuk peningkatan keterampilan sosial. Oleh karena itu, ada beberapa komponen yang dapat mendukung terwujudnya karakter pemersatu bangsa dalam UN atau pembelajaran, di antaranya adalah kualitas belajar, perlu adanya bimbingan, dan pendidikan keluarga.

Belajar pada hakikatnya "perubahan" yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu (Fathurrohman dan Sutikno, 2009). Bimbingan adalah suatu proses yang berkesinambungan bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan, bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian

kegiatan (Yusuf dan Nurihsan, 2008). Keluarga juga memengaruhi penuh terhadap terwujudnya karakter karena keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama yang dialami oleh anak dan dalam kehidupan keluarga selalu memengaruhi perkembangan budi pekerti siswa (Rohman, 2009).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan semua uraian di atas, hasil penelitian dapat disimpulkan dengan adanya temuan-temuan sebagai berikut. Pertama, UN sebagai pemersatu bangsa. Sebagian besar responden 62 (79,5%) menyatakan setuju bahwa UN menjadi pemersatu bangsa, sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju adalah 16 (20,5%).

Kedua, UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional. Sebagian besar responden menyatakan bahwa UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional adalah 46 (59%), sedangkan responden yang menyatakan tidak adalah 32 (41%).

Ketiga, Ujian Sekolah dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional. Sebagian besar responden menyatakan bahwa Ujian Sekolah dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional adalah 49 (62,8%), sedangkan responden yang menyatakan tidak adalah 29 (37,2%).

Keempat, Nilai minimal lulus UN. Sebagian besar responden menyatakan bahwa nilai minimum lulus UN adalah 6,0 responden terbanyak menyarankan hal ini 33 (42,4%), sedangkan responden yang lainnya menyarankan minimal 5,50 ada 14 (17,9%).

Kelima, UN dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Sebagian besar responden menyatakan bahwa UN masih diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adalah 39 (50%), sedangkan responden yang menyatakan tidak adalah 27 (34,6%), serta responden yang menyatakan diganti dengan model lainnya adalah 12 (15,4%).

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada saran penting seperti berikut ini. Kepada semua pihak pelaku pendidikan di tanah air agar lebih berlaku jujur dalam menjawab soal-soal UN dan memperkecil ketidakkelulusan siswa. Dengan dua aspek inilah UN dapat menambah keyakinan masyarakat bahwa UN dapat menjadi cermin mutu pendidikan dan sebagai alat pemersatu bangsa di tanah air. Jadi, bangsa tetap bersatu, damai, dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. Untuk mendukung dua aspek tersebut, seluruh komponen pendidikan sudah saatnya melaksanakan jiwa nasionalisme yang kuat disertai dengan karakter atau prinsip "takut kepada Tuhan dan malu berbuat tercela" agar pelaksanaan ujian nasional tidak dinodai oleh kecurangan-kecurangan dan pelanggaran nilai dan norma. Budayakanlah prinsip tersebut untuk pelaksanaan UN tahun berikutnya dan pelaksanaan Kurikulum 2013, karena UN dan kesuksesan pelaksanaan Kurikulum 2013 mencerminkan tingkat keberhasilan proses belajar mengajar di seluruh Indonesia dan sebagai tolok ukur sebuah sekolah dalam membina siswanya. Karakter atau

prinsip yang kuat seperti ini telah ditunjukkan oleh para pahlawan kita, namun saat ini karakter seperti itu sudah mulai melemah tumbuh dan berkembang pada diri siswa. Karena setiap kali UN dilaksanakan idealisme, prinsip, dan budaya malu secara otomatis tersingkir jauh-jauh dari hati para pihak yang terlibat dalam UN. Siswa tidak lagi percaya diri, karena itulah ia tidak lagi malu untuk mencontek, meminta jawaban lewat SMS, serta meminta jawaban kepada pengawas di ruang ujian. Guru tidak lagi memegang teguh prinsip dan idealismenya, yakni dengan memberikan kunci jawaban kepada anak, adik, serta kerabatnya saat ujian berlangsung. Belum lagi kecurangan-kecurangan sistematis yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membantu kelulusan siswanya. Jika para siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, serta seluruh komponen pendidikan sudah melaksanakan esensi dari karakter atau prinsip "takut kepada Tuhan dan malu berbuat tercela", maka setiap ada ujian nasional tidak akan dinodai oleh kecurangan-kecurangan dan pelanggaran nilai dan norma, karena UN mencerminkan mutu pendidikan dan sebagai pemersatu bangsa.

## PUSTAKA ACUAN

- Afiati, Y.S. 2006. Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu pendidikan sebagai Implementasi Konsep *School Based Management* (Penelitian di MTs Darul Hikmah Pamulang) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/10038/1/YUNI%20SASMITA%20AFIATI.pdf>. diunduh tanggal 5 Juni 2014.
- Ahmadi, A. 2009. *Psikologi Umum, edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aisyah, S.D. 2010. Representasi Batik sebagai Simbol Budaya Indonesia. <http://library.fikom.unpad.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunpadfikom-gdl-sitidewiai-3585>. diunduh tanggal 10 Juni 2014.
- Azwar, S. 2007. *Tes Prestasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Seri Analisis Kebijakan Pendidikan. Ujian Nasional: Kajian Komprehensif tentang Bentuk, Fungsi, dan Makna*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.

- Derajat, W. 2005. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: PT Gramedia.
- Djaali & Muljono. 2007. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Djamarah, S. B. 2008. *Psikologi Belajar*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Djiwandono, W.E. 2008. *Psikologi Pendidikan, edisi revisi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Dubois, B., & Ley, M., Krogsrud, K. 2005. *Social Work An Empowering Profession*. Fifth Edition. Boston: Pearson Education.
- Fahmi. 2013. Kemampuan Penguasaan Materi Pelajaran Guru SMA/MA Berdasarkan Hasil Ujian Nasional Rendah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(2), hlm. 189-205.
- Fathurrohman, P., & Sutikno, M. S., 2009. *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Hasan, I. 2009. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jaidun, A. 2011. Benchmarking Standar Mutu Pendidikan. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Penilaian untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Hotel Salak, Bogor*. Tanggal 26-27 Desember 2011.
- Kusumah, S. D. 2007. Pengelolaan Keragaman Budaya "Strategi Adaptasi". [http://www.parekraf.go.id/userfiles/file/5199\\_1443-5\\_KERAGAMANBUDAYA1OKE.pdf](http://www.parekraf.go.id/userfiles/file/5199_1443-5_KERAGAMANBUDAYA1OKE.pdf) diakses 7 Juli 2014.
- Lembah, G., Tellu, A.T., Juraid, Mahpudz, & Haeruddin. 2010. Analisis Kebijakan Hasil Ujian Nasional SMA/MA untuk Memetakan Tingkat Kompetensi Siswa dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=270189&val=6116&title=ANALISIS%20KEBIJAKAN%20HASIL%20UJIAN%20NASIONAL%20SMA/MA%20UNTUK%20MEMETAKAN%20TINGKAT%20KOMPETENSI%20SISWA%20DAN%20MUTU%20PENYELENGGARAAN%20PENDIDIKAN%20DI%20PROVINSI%20SULAWESI%20TENGAH> diakses 3 Juli 2014.
- Linn, R. L. & Gronlund, N. E. 2008. *Measurement and Assessment in Teaching*, 10th Edition. USA: Prentice Hall.
- Mulyana, Aina; Hidayat, Soleh; dan Sholih. 2013. Hubungan antara Persepsi, Minat, dan Sikap Siswa dengan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran PKn. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(3), hlm. 315-330.
- Pandansari, D. S. 2014. Pembudayaan Butir Pancasila ke-3 Melalui Filosofi Sarinah sebagai Pemersatu Bangsa Berbasis Gender. <https://books.google.co.id/books?id=Vfkbaaaqbj&pg=PA398&1pg=PA398&dq=penelitian+pemersatu+bangsa&source=bl&ots=zmUSDRSIM&sig=R-QHSgDGrhdBnAh9TmFKSjBWsU&hl=en&sa=X&ved=0CFcQ6AEwCDhGahUKEwipsajL3ofGAhWET7wKHTduACo#v=onepage&q=penelitian%20pemersatu%20bangsa&f=false>, diakses 14 November 2014.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Laporan Hasil Ujian Nasional Tahun 2014. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang.
- Rohman, A. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Safari. 2008. *Penulisan Butir Soal Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI).
- Sadulloh, U. 2007. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Somantri, S. T. 2007. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudjarwo. 2012. Transformasi Nilai-nilai Budaya Transmigran sebagai Alat Pemersatu Bangsa. <http://prof-sudjarwo.blogspot.com/2012/12/transformasi-nilai-nilai-budaya.html>, diakses 25 Juni 2014.
- Suprastowo, P. 2013. Kajian tentang Tingkat Ketidakhadiran Guru Sekolah Dasar dan Dampaknya terhadap Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(1), hlm. 31-49.
- Suryabrata, S. 2008. *Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: PT Andi.
- Sutjipto. 2013. Kurikulum Pendidikan Budaya pada Satuan Pendidikan Rintisan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), hlm. 472-486.
- Yusuf, S., dan Nurihsan, J., 2008. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

